



**PIDATO  
PENJABAT GUBERNUR DKI JAKARTA  
PADA ACARA  
RAPAT PARIPURNA DPRD PROVINSI DKI JAKARTA  
DALAM RANGKA  
PENYAMPAIAN LAPORAN HASIL PEMBAHASAN BAPEMPERDA,  
PERMINTAAN PERSETUJUAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD,  
PENYERAHAN SECARA SIMBOLIS DAN PENYAMPAIAN  
PENDAPAT AKHIR PENJABAT GUBERNUR  
TERHADAP  
RAPERDA TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH  
NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG  
DAN PERATURAN ZONASI, DAN  
RAPERDA TENTANG PELAKSANAAN PENGHORMATAN,  
PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK  
PENYANDANG DISABILITAS**

Oleh :

**Heru Budi Hartono**

**Pj. Gubernur DKI Jakarta**

**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**  
Senin, 17 Oktober 2022

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,  
Salam sejahtera untuk semua.

- Yth. - Ketua, para Wakil Ketua dan Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta;
- Para Anggota DPR RI Daerah Pemilihan Provinsi DKI Jakarta;
  - Para Anggota DPD RI Daerah Pemilihan Provinsi DKI Jakarta;
  - Para Anggota Forkopimda Provinsi DKI Jakarta;
  - Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta;
  - Para Pejabat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;
  - Hadirin dan undangan yang saya hormati.

Marilah kita memanjatkan puji dan rasa syukur ke hadirat Allah Subhanahu Wata'ala, Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan ridho-Nya, sehingga kita dapat menghadiri Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta dalam rangka ***Penyampaian Pendapat Akhir Penjabat Gubernur terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang:***

- 1. Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi; dan***
- 2. Pelaksanaan Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.***

Saya sebagai Penjabat Gubernur DKI Jakarta menyampaikan rasa terima kasih dan apresiasi yang tinggi kepada Pimpinan dan segenap Anggota Dewan, atas ketelitian dalam mencermati seluruh substansi materi Raperda tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi dan Raperda tentang Pelaksanaan Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas yang merupakan revisi dari Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perlindungan Penyandang Disabilitas, sehingga persetujuan DPRD dapat diberikan. Eksekutif akan menindaklanjuti berbagai saran, komentar, catatan-catatan dan rekomendasi Dewan sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan.

**Saudara Ketua, para Wakil Ketua dan Anggota Dewan yang saya hormati,**

Disetujuinya Raperda tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi ini menjadi Peraturan Daerah, merupakan amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja beserta peraturan pelaksanaannya yang merupakan bentuk kebijakan Pemerintah dalam rangka mendukung percepatan peningkatan nilai investasi dan kemudahan berusaha.

Selanjutnya, Eksekutif telah mengundang Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2022 tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan (RDTR WP) Provinsi DKI Jakarta. Melalui Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2022 tentang RDTR WP Provinsi DKI Jakarta, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan terus mengoptimalkan dan mendukung terwujudnya pemanfaatan ruang yang produktif secara berkelanjutan melalui upaya integrasi kebijakan pembangunan nasional dan sektoral, mengakomodasi dinamika pembangunan di Provinsi DKI Jakarta serta penguatan pelembagaan penataan ruang.

## **Rapat Dewan yang saya hormati,**

Disetujuinya Raperda tentang Pelaksanaan Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas ini menjadi Peraturan Daerah, menjadi landasan hukum yang kuat bagi Eksekutif dalam implementasi peraturan daerah ini di lapangan. Peraturan Daerah ini juga menjadi penyemangat Eksekutif untuk mengajak berbagai pihak dalam menumbuhkan dan meningkatkan perhatian serta kepedulian terhadap para penyandang disabilitas, untuk berkolaborasi bersama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam upaya meningkatkan kesejahteraan dan prestasi bagi penyandang disabilitas di segala bidang. Eksekutif juga berharap Perda tentang Pelaksanaan Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas ini, menjadi barometer bagi Perda serupa di berbagai daerah di seluruh Indonesia, sehingga terciptanya sumber daya manusia disabilitas yang unggul dan sejahtera di Indonesia.

Eksekutif berharap, kiranya Dewan terus mengawal dan memberikan masukan dalam setiap pelaksanaan berbagai ketentuan Perda tentang Pelaksanaan Penghormatan, Perlindungan dan

Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di DKI Jakarta, sehingga memberikan kontribusi terhadap upaya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam menghadirkan kesetaraan, keadilan dan kebahagiaan bagi para penyandang disabilitas yang setara dengan warga Kota Jakarta lainnya dalam berbagai aspek.

**Ketua, para Wakil Ketua dan para Anggota Dewan yang terhormat,**

Pada kesempatan yang baik ini, izinkan saya menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada segenap Anggota Dewan, atas tingginya semangat kemitraan antara Legislatif dan Eksekutif yang terus terjaga dengan sangat baik selama ini. Semangat kemitraan tersebut menjadi pondasi tak tergoyahkan terhadap kolaborasi kita bersama, baik dalam pembangunan kota Jakarta maupun dalam mewujudkan keadilan, kemajuan, kebahagiaan, kesejahteraan dan kesetaraan para penyandang disabilitas dengan warga masyarakat Kota Jakarta lainnya.

Semoga Allah Subhanahu Wata'ala, Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa terus memberikan petunjuk, kemudahan dan bimbingan-Nya kepada kita semua dalam memantapkan kolaborasi, akselerasi dan elevasi bagi peningkatan, kesetaraan, kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat, serta sukses pembangunan Kota Jakarta.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Jakarta, 17 Oktober 2022

Pj. Gubernur Daerah Khusus

Ibukota Jakarta,



Heru Budi Hartono